

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah, keanekaragaman hayati dan peninggalan sejarah dan budaya. Berlimpahnya sumber daya alam yang ada dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi ketika sumber daya tersebut dapat di kelola dengan baik sesuai dengan apa yang paling diminati masyarakat sehingga pemanfaatan sumber daya alam tersebut tidak akan menghabiskan waktu ataupun materi akibat ketidakberhasilan dalam mengelola suatu sumber daya.

Perkembangan dunia saat ini dalam menjaga keberlanjutan umat manusia tedapat upaya *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang memiliki tujuan pembangunan berkelanjutan. Sustainability merupakan konsep keberlanjutan yang dicetuskan sejak tahun 1980-an. Konsep ini mengacu pada proses sosio-ekologis yang berlangsung secara dinamis dan terus menerus, menghasilkan sistem berkelanjutan yang dapat diterapkan secara jangka panjang. *SDGs* merupakan upaya masyarakat dunia dalam menjaga kehidupan bermasyarakat agar aspek kehidupan dapat terjaga seperti, ekonomi, sosial, lingkungan, dan kesehatan. Adanya *SDGs* memudahkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga dan menerapkan pembangunan berkelanjutan dalam proses kelangsungan hidup manusia. Agenda *SDGs* mulai dilakukan pada tahun 2015 sampai akhir tahun 2030 untuk mengakhiri kemiskinan, mengatur perdamaian dunia, kemakmuran, dan kesempatan untuk mendapatkan lingkungan yang sehat (*United Nations Development Programs, 2020*).

Kehidupan manusia terus bertumbuh seiring dengan bertambahnya kebutuhan sandang (pakaian), pangan (makan), dan papan (tempat tinggal). Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 proyek super prioritas pemerintah mengarahkan pada penyediaan perumahan dan pemukiman layak, aman, dan dan terjangkau di perkotaan dengan fasilitas penanganan pemukiman kumuh perkotaan. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan *SDGs* ke-11 terkait kota dan permukiman berkelanjutan dengan harapan menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Target dari tujuan *SDGs* ke-11 adalah memberikan jaminan akses terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, pelayanan dasar, serta menata kawasan

kumuh. Salah satu target yang akan dilakukan adalah menjawab permasalahan permukiman kumuh yang masih banyak dijumpai di kota-kota besar Indonesia dengan penduduk yang dominan dari wilayah lain (BAPPENAS,2016).

Pertambahan penduduk suatu wilayah memiliki dampak terhadap timbulnya permasalahan sosial meliputi pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, dan keterbatasan lahan permukiman yang layak bagi masyarakat (Harahap, 2013). Keterbatasan lahan mengakibatkan masyarakat menempati area yang tidak seharusnya ditempati atau didirikan bangunan sebagai tempat tinggal. Rendahnya tingkat kesejahteraan, perilaku hidup sehat, ketaatan dan kesadaran hukum terhadap kelestarian lingkungan menjadi salah satu faktor tumbuhnya kawasan permukiman kumuh (slum area). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mendefinisikan bahwa

Menurut Rahardjo (2010) Permukiman kumuh merupakan kawasan yang memiliki ciri khas sebagai kawasan miskin, tidak memadai, kelebihan penduduk, apatis, tidak aman, kotor, tidak sehat, dan berbagai tanggapan negatif lainnya. Kawasan permukiman kumuh menjadi permasalahan perkotaan di Indonesia yang disebabkan adanya urbanisasi, pertambahan jumlah penduduk, dan kebutuhan akan tempat tinggal yang meningkat. Permasalahan permukiman kumuh berdampak terhadap kualitas lingkungan dikarenakan lahan terbatas dan kebutuhan tempat tinggal meningkat akan mengakibatkan masyarakat mendirikan permukiman disembarang tempat. Kecenderungan tersebut juga didorong oleh pola hidup tidak memperhatikan dampak lingkungan bagi kesehatan penghuninya. Potensi pendirian bangunan tanpa memperhatikan lingkungan berdampak terhadap munculnya kawasan permukiman kumuh yang tidak memenuhi indikator permukiman layak huni dengan ketersediaan sarana dan prasarana seperti kepadatan bangunan, akses air bersih, dan drainase.

Permukiman di perkotaan yang memiliki permasalahan penurunan kualitas permukiman dan minimnya sarana prasarana berdampak terhadap kesehatan, keberlangsungan hidup, serta kesejahteraan masyarakat sekitar. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 177/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Bantuan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2021 menjelaskan bahwa kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) merupakan salah satu jenis dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat yaitu bantuan pembangunan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat dan kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat bidang sanitasi. Kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman

berbasis masyarakat meliputi Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dan Kegiatan Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat Kota Tanpa Kumuh (BPM KOTAKU).

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 juga mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah tersebut. Perda ini merupakan pedoman dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan tujuan melindungi wilayah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencapai keserasian serta keseimbangan lingkungan.

Kemudian di Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh. tujuan Peraturan Walikota Dalam rangka perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh dilakukan melalui berbagai tahapan, salah satunya yaitu tahapan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.

Pertambahan jumlah penduduk di Indonesia yang meningkat pada setiap tahunnya, menuntut akan kebutuhan tempat tinggal. Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia salah satunya disebabkan oleh urbanisasi. Akibat yang ditimbulkan dari urbanisasi berdampak terhadap munculnya permasalahan sosial dan lingkungan. Berikut adalah Tabel 1 yang menyajikan Data Jumlah Penduduk di Indonesia Tahun 2020-2022.

**Tabel 1 Jumlah Penduduk menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2020-2022**

| No | Provinsi             | 2020     | 2021     | 2022     |
|----|----------------------|----------|----------|----------|
| 1  | Aceh                 | 5 274,9  | 5 333,7  | 5 407,9  |
| 2  | Sumatera Utara       | 14 799,4 | 14 936,2 | 15 115,2 |
| 3  | Sumatera Barat       | 5 534,5  | 5 580,2  | 5 640,6  |
| 4  | Riau                 | 6 394,1  | 6 493,6  | 6 614,4  |
| 5  | Kep. Riau            | 2 064,6  | 2 118,2  | 2 179,8  |
| 6  | Jambi                | 3 548,2  | 3 585,1  | 3 631,1  |
| 7  | Sumatera Selatan     | 8 467,4  | 8 550,9  | 8 657,0  |
| 8  | Kep. Bangka Belitung | 1 455,7  | 1 473,2  | 1 494,6  |
| 9  | Bengkulu             | 2 010,7  | 2 032,9  | 2 060,1  |

|    |                     |          |          |          |
|----|---------------------|----------|----------|----------|
| 10 | Lampung             | 9 007,8  | 9 081,8  | 9 176,6  |
| 11 | DKI Jakarta         | 10 562,1 | 10 609,7 | 10 680,0 |
| 12 | Jawa Barat          | 48 274,2 | 48 782,4 | 49 405,8 |
| 13 | Banten              | 11 904,6 | 12 061,5 | 12 252,0 |
| 14 | Jawa Tengah         | 36 516,0 | 36 742,5 | 37 032,4 |
| 15 | DI Yogyakarta       | 3 668,7  | 3 712,9  | 3 761,9  |
| 16 | Jawa Timur          | 40 665,7 | 40 878,8 | 41 150,0 |
| 17 | Kalimantan Barat    | 5 414,4  | 5 470,8  | 5 541,4  |
| 18 | Kalimantan Tengah   | 2 670,0  | 2 702,2  | 2 741,1  |
| 19 | Kalimantan Selatan  | 4 073,6  | 4 122,6  | 4 182,1  |
| 20 | Kalimantan Timur    | 3 766,0  | 3 808,2  | 3 859,8  |
| 21 | Kalimantan Utara    | 701,8    | 713,6    | 727,8    |
| 22 | Sulawesi Utara      | 2 621,9  | 2 638,6  | 2 659,5  |
| 23 | Gorontalo           | 1 171,7  | 1 181,0  | 1 192,7  |
| 24 | Sulawesi Tengah     | 2 985,7  | 3 021,9  | 3 066,1  |
| 25 | Sulawesi Selatan    | 9 073,5  | 9 139,5  | 9 225,8  |
| 26 | Sulawesi Barat      | 1 419,2  | 1 436,8  | 1 458,6  |
| 27 | Sulawesi Tenggara   | 2 624,9  | 2 659,2  | 2 701,7  |
| 28 | Bali                | 4 317,4  | 4 362,7  | 4 415,1  |
| 29 | Nusa Tenggara Barat | 5 320,1  | 5 390,0  | 5 473,7  |
| 30 | Nusa Tenggara Timur | 5 325,6  | 5 387,7  | 5 466,3  |
| 31 | Maluku              | 1 848,9  | 1 862,6  | 1 881,7  |
| 32 | Maluku Utara        | 1 282,9  | 1 299,2  | 1 319,3  |
| 33 | Papua Barat         | 1 134,1  | 1 156,8  | 1 183,3  |
| 34 | Papua               | 4 303,7  | 4 355,5  | 4 418,6  |

Sumber : BPS, 2021

Berdasarkan data tersebut Jawa Tengah termasuk dalam kategori 3 provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia pada Tahun 2020 sampai 2022. Rata-rata pertambahan penduduk sebanyak 3000 ribu jiwa setiap tahunnya. Angka tersebut menunjukkan pertambahan penduduk yang cukup besar mengingat lahan yang semakin terbatas dan kebutuhan akan tempat tinggal semakin meningkat. Provinsi Jawa Tengah memiliki 29 wilayah kabupaten dan 6 wilayah kota. Wilayah kota di Provinsi Jawa Tengah meliputi Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, dan Kota Semarang. Kota Semarang

merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah yang merupakan kota metropolitan dengan jumlah penduduk yang padat. Berikut Gambar yang menunjukkan Jumlah Penduduk Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2024. .

**Gambar 1 Jumlah Penduduk Wilayah Kota di Provinsi JawaTengah 2023-2024**

| Kabupaten/Kota         | 2023    | 2024    |
|------------------------|---------|---------|
| Kabupaten Cilacap      | 2007.83 | 2027.38 |
| Kabupaten Banyumas     | 1828.57 | 1847.1  |
| Kabupaten Purbalingga  | 1027.33 | 1037.64 |
| Kabupaten Banjarnegara | 1047.23 | 1057.56 |
| Kabupaten Kebumen      | 1397.56 | 1414.75 |
| Kabupaten Purworejo    | 788.27  | 795.03  |
| Kabupaten Wonosobo     | 909.66  | 920.51  |
| Kabupaten Magelang     | 1330.66 | 1341.45 |
| Kabupaten Boyolali     | 1090.13 | 1099.85 |
| Kabupaten Klaten       | 1284.39 | 1292.8  |
| Kabupaten Sukoharjo    | 932.68  | 941.65  |
| Kabupaten Wonogiri     | 1051.09 | 1054.15 |
| Kabupaten Wonogiri     | 955.12  | 961.91  |
| Kabupaten Sragen       | 997.49  | 1004.76 |
| Kabupaten Grobogan     | 1492.89 | 1506.37 |
| Kabupaten Blora        | 901.62  | 907.99  |
| Kabupaten Rembang      | 660.17  | 665.24  |
| Kabupaten Pati         | 1359.36 | 1370.82 |
| Kabupaten Kudus        | 874.63  | 883.32  |
| Kabupaten Jepara       | 1221.09 | 1232.88 |
| Kabupaten Demak        | 1240.51 | 1089.77 |
| Kabupaten Semarang     | 1080.65 | 814.88  |
| Kabupaten Temanggung   | 808.45  | 1064.81 |
| Kabupaten Kendal       | 1052.83 | 838.19  |
| Kabupaten Batang       | 828.88  | 1019.01 |
| Kabupaten Pekalongan   | 1007.38 | 1541.69 |
| Kabupaten Pemalang     | 1523.62 | 1674.8  |
| Kabupaten Tegal        | 1654.84 | 2065.5  |
| Kabupaten Brebes       | 2043.08 | 122.43  |
| Kota Magelang          | 122.15  | 528.04  |
| Kota Surakarta         | 526.87  | 201.27  |
| Kota Salatiga          | 198.92  | 201.27  |
| Kota Semarang          | 1694.74 | 1708.83 |
| Kota Pekalongan        | 317.52  | 321.1   |
| Kota Tegal             | 282.78  | 285.84  |

Sumber : BPS, 2022

Berdasarkan data pada Gambar 1 yang menunjukkan bahwa kota semarang memiliki jumlah penduduk terbesar dari wilayah kota lain di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebanyak 1,6 juta jiwa kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah menjadi tujuan bagi

seluruh masyarakat dalam memperoleh penghidupan layak dan infrastruktur yang memadai serta berbagai fasilitas yang lengkap. Hal tersebut pada realisasinya berbanding terbalik dengan kesediaan kapasitas lahan yang dimiliki Kota Semarang saat ini tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang ada. Semakin bertambahnya penduduk tentunya kebutuhan akan kehidupan yang layak seperti tempat tinggal merupakan hal pokok dalam kehidupan. Ketersediaan lahan yang terbatas dan dibarengi adanya kebutuhan tempat tinggal akan mengakibatkan masyarakat yang kurang mampu untuk membeli rumah di pusat kota akan memilih perumahan yang berada jauh dari kota dan biasanya berlokasi di perbatasan wilayah. Permukiman kumuh yang masih terdapat di Kota Semarang dapat menjadikan permasalahan yang berakibat terhadap kestabilan lingkungan dan tentunya kesehatan dari masyarakat setempat. Berikut Tabel 2 menyajikan daftar kecamatan dengan perumahan dan permukiman kumuh beserta luasannya di Kota Semarang berdasarkan

**Tabel 2 Daftar Kecamatan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Semarang Tahun 2021**

| No  | Kacamatan        | Luasan Kumuh (ha) | Jumlah Penduduk |
|-----|------------------|-------------------|-----------------|
| 1.  | Mijen            | 123,75            | 83.321,00       |
| 2.  | Semarang Utara   | 78,44             | 116.820,00      |
| 3.  | Tugu             | 56,3              | 32.948,00       |
| 4.  | Genuk            | 51,48             | 125.967,00      |
| 5.  | Tembalang        | 32,77             | 191.560,00      |
| 6.  | Ngaliyan         | 26,84             | 142.131,00      |
| 7.  | Banyumanik       | 18,5              | 141.689,00      |
| 8.  | Gayamsari        | 12,97             | 69.729,00       |
| 9.  | Gunungpati       | 11,4              | 98.343,00       |
| 10. | Semarang Timur   | 9,0               | 65.859,00       |
| 11. | Pendurungan      | 8,6               | 193.128,00      |
| 12. | Semarang Barat   | 2,6               | 147.885,00      |
| 13. | Semarang Tengah  | 1,8               | 54.696,00       |
| 14. | Candisari        | -                 | 74.952,00       |
| 15. | Gajahmungkur     | -                 | 55.857,00       |
| 16. | Semarang Selatan | -                 | 61.616,00       |
|     | Total            | 431,54            | 1.687.564,00    |

Sumber : Data di Olah SK Walikota Semarang Nomor 050/275 Tahun 2021 dan BPS (2021)

Berdasarkan tabel 2 yang menunjukkan data luasan kumuh dan jumlah penduduk di Kota Semarang dari 16 kecamatan diketahui bahwa Kecamatan Semarang Utara merupakan wilayah dengan luasan kumuh besar dengan jumlah penduduk kategori besar. Pada tabel tersebut juga diketahui bahwa Kecamatan Mijen, Genuk, dan Tugu merupakan wilayah dengan luasan kumuh besar namun apabila dilihat dari jumlah penduduknya, Kecamatan Semarang Utara masih tergolong ke dalam kecamatan dengan luasan kumuh dan jumlah penduduk yang terbilang besar yakni luasan kumuh 76,48 hektar serta jumlah penduduk sebanyak 116.820,00 jiwa. Berikut tabel 3 menyajikan data luasan kumuh di Kecamatan Semarang Utara pada masing-masing kelurahan pada tahun 2021 berdasarkan SK Walikota Semarang Nomor 050/275 Tahun 2021

**Tabel 3 Luasan Kelurahan dengan Kawasan Kumuh di Kecamatan Semarang Utara Tahun 2021**

| No | Nama Kelurahan           | Luas Wilayah (km2 | 2021  | 2022  |
|----|--------------------------|-------------------|-------|-------|
| 1. | Kelurahan Bandarharjo    | 3,43              | 4,26  | -     |
| 2. | Kelurahan Bulu Lor       | 0,60              | 1,85  | -     |
| 3. | Kelurahan Plombokan      | 0,60              | 4,83  | -     |
| 4. | Kelurahan Purwosari      | 0,48              | 2,84  | -     |
| 5. | Kelurahan Panggung Kidul | 0,34              | 5,47  | -     |
| 6. | Kelurahan Panggung Lor   | 1,42              | 2,43  | -     |
| 7. | Kelurahan Kuningan       | 0,41              | 15,30 | 14,10 |
| 8. | Kelurahan Tajung Mas     | 4,34              | 23,42 | 17,34 |
| 9. | Kelurahan Dadapsari      | 0,47              | 25,32 | 22,32 |

Sumber : SK Walikota Semarang Nomor 050/275 Tahun 2021

Berdasarkan tabel tersebut Kelurahan Tanjung Mas merupakan kelurahan dengan luasan permukiman kumuh terbesar kedua di Kecamatan Semarang Utara sebesar 17,34 hektar. Kelurahan Tanjung mas merupakan salah satu kelurahan yang terpilih dalam salah satu program dari penanganan permukiman kumuh pada tahun 2018 karena merupakan kelurahan kategori Kumuh Sedang. Berikut adalah Tabel 4 yang menunjukkan Wilayah Kumuh di Kelurahan Tanjung dari tahun ke tahun.

**Tabel 4 Wilayah Kumuh di Kelurahan Tanjung dari Tahun ke Tahun.**

| Tahun | Kawasan Pemukiman Kumuh (ha) |
|-------|------------------------------|
| 2021  | 23,42                        |
| 2022  | 17,32                        |
| 2023  | -                            |

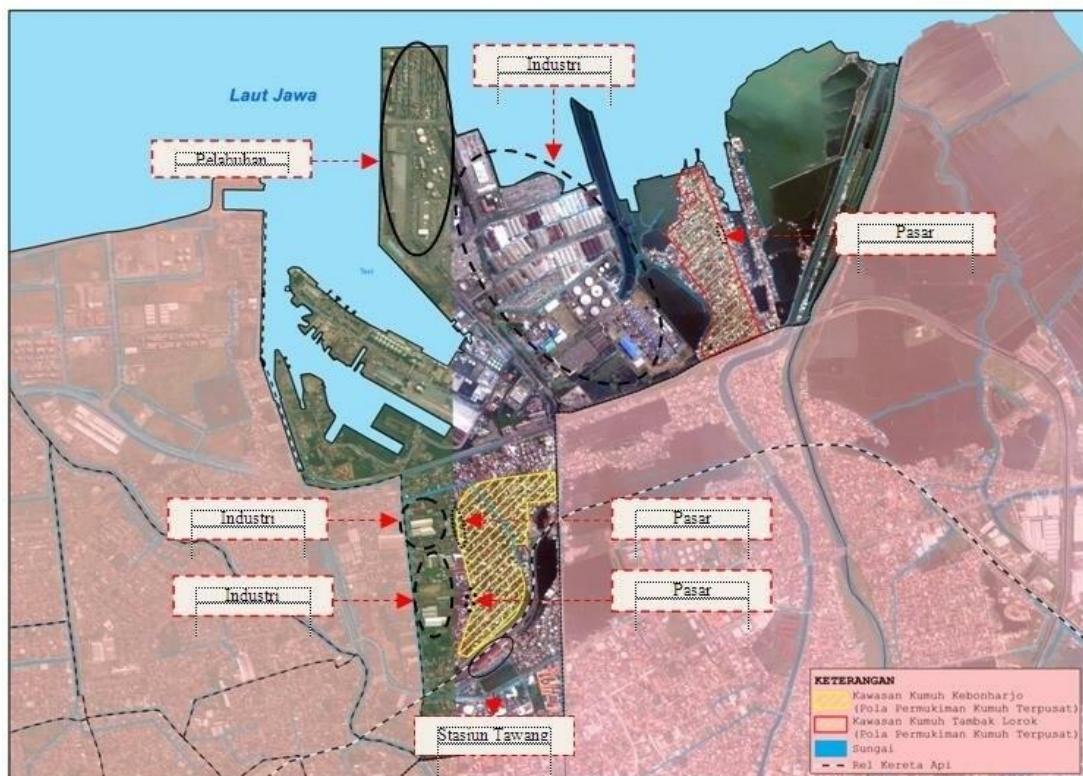
Sumber data : SK Walikota Semarang No. 050/275 Tahun 2021 dan Peraturan Walikota Semarang No 19 Tahun 2023

Rencana Strategis yang sudah dilakukan pemerintah Kota Semarang Khususnya Dinas Perumahan dan Pemukiman Penduduk berdasarkan peraturan walikota Semarang No 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pemukiman kumuh di Kelurahan Tanjung mas. Adapun Rencana Strategi yang sudah di lakukan yaitu

1. Sosialisasi Rumah sehat dan rumah layak huni dengan membangun redevelopment kawasan
2. Peningkatan kualitas jalan.
3. Sosialisasi kepada masyarakat terkait penyediaan air minum dengan penambahan sambungan PDAM.
4. Sosialisasi kepada masyarakat terkait drainase lingkungan dan membangun pompa mobile.
5. Pengadaan TPS (Tempat pembuangan sampah dan penyediaan Bank Sampah.
6. Kampanye sanitasi
7. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemisahan saluran buangan rumah tangga.
8. Edukasi tentang pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
9. PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat)

Pada kenyataannya berdasarkan SK Walikota Semarang Nomor 050/275 Tahun 2021 menunjukan Kelurahan Tanjung Mas memiliki luasan permukiman kumuh terbesar di Kecamatan Semarang Utara sampai saat ini, hal tersebut menunjukan bahwa penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Tanjung Mas masih belum optimal dan masih belum mencapai target sampai 0 %. Tuntutan dari keterlibatan seluruh stakeholder dalam upaya pengentasan permukiman kumuh masih menjadi hal yang perlu dioptimalkan di Kelurahan Tanjung Mas. Berikut adalah Gambar 2 yang menunjukan Wilayah Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas Beserta lokasinya.

**Gambar 2 Luasan Pemetaan Wilayah Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas**



Sumber : Data Diolah

Berdasarkan gambar tersebut pemetaan lingkungan kumuh di kelurahan tanjung mas ada 2 kategori kumuh yang tersebar di lingkungan kebonharjo kumuh ringan dan kawasan kampung bahari Tambak Lorok Kumuh Berat. Berikut adalah Tabel 5 yang menunjukkan Wilayah Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas Beserta lokasinya.

**Tabel 5 Luasan Wilayah Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas Tahun 2021**

| RW   | RT              | Total Luasan Kumuh (ha) |
|------|-----------------|-------------------------|
| II   | 3,8             | 0,62                    |
| IV   | 3,8             | 0,74                    |
| VI   | 7,8             | 0,93                    |
| VIII | 2,3,4,75        | 1,73                    |
| XII  | 5,6,7,8         | 4,12                    |
| XIII | 1,2,3,4,5       | 3,45                    |
| XIV  | 9,4,5,6,9,10    | 3,32                    |
| XV   | 1,2,3,4,5,6,7,9 | 4,23                    |

**Gambar 3 Wilayah Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas  
( Sanitasi )**



Sumber : Dokumentasi Pribadi

Pada gambar 3 tersebut merupakan kondisi salah satu rumah warga RW 15 Kelurahan Tanjung Mas yang mengalami permasalahan sanitasi tidak baik disebabkan oleh tumpukan sampah pada aliran pembuangan limbah rumah tangga. Dan pemerintah kelurahan dan DISPERKIM masih belum memaksimalkan sistem pengelolaan yang tidak sesuai standar teknis yang masih banyak sekitar 326 KK dan prasarana dan sarana pengelolaan limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis 620 KK

Hal tersebut menunjukkan bahwa titik kumuh di wilayah tersebut masih termasuk ke dalam kategori kawasan kumuh. Selain sanitasi, pada gambar 4 menyajikan lokasi kumuh di kelurahan Tanjung Mas terkait kondisi jalan di wilayah tersebut.

**Gambar 4 Wilayah Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas  
( Kondisi Jalan )**



Sumber : Dokumentasi Pribadi

wilayah terindikasi kumuh di Kelurahan Tanjung Mas memiliki kondisi jalan yang kurang baik masih tercatat sebagai Kawasan kumuh berkaitan dengan jalan dan sampah yang menumpuk disepanjang jalan. Selain itu beberapa wilayah di Kelurahan Tanjung Mas masih menggunakan lahan kosong sebagai tempat pembuangan limbah rumah tangga dan masih belum berjalan dengan optimalnya *collaborative governance* program dari peraturan walikota tentang kawasan lingkungan kumuh masih jauh dari harapan dengan kondisi jalan lingkungan dikawasan yang tidak diperkeras dan mengalami kerusakan sebesar 4.122 m dan jalan yang tidak dilengkapi saluran samping sekitar 880n m. dengan gambar 5 sebagai berikut. wilayah terindikasi kumuh di Kelurahan Tanjung Mas memiliki kondisi jalan yang kurang baik masih tercatat sebagai Kawasan kumuh berkaitan dengan jalan dan sampah yang menumpuk disepanjang jalan. Selain itu beberapa wilayah di Kelurahan Tanjung Mas masih menggunakan lahan kosong sebagai tempat pembuangan

**Gambar 5 Wilayah Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas  
( Penanganan sampah )**



Sumber : Dokumentasi Pribadi

Berdasarkan gambar tersebut permasalahan pengelolaan sampah di Kelurahan Tanjung Mas masih belum teratasi dengan baik. Padahal pengelolaan sampah merupakan indikator penting dalam penanganan permukiman kumuh.

Akan tetapi, di wilayah RW 15 dan 16 masalah sampah masih menjadi hal wajar di beberapa lokasi Kelurahan Tanjung Mas sampai saat ini. Berdasarkan penjelasan dari salah seorang koordinator penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banjardowo mengatakan bahwa Kelurahan Tanjung Mas dalam proses kolaborasi belum optimal.

Permasalahan sampah di kelurahan Tanjung Mas Rw 15 dan 16 masih ada warga yang membuang sampah secara semarang di sekitar tempat tinggalnya yang memicu timbunan sampah di lahan yang kosong, pengambilan sampah yang tidak terjadwal, belum ada organisasi khusus yang menangani pengelolaan sampah dan belum optimalnya collaborative governance. "Kalau untuk proses kolaborasinya disini memang belum berjalan baik karena butuh kontribusi dari masyarakat untuk menuntaskan Kawasan kumuh di Kelurahan " (BKM Kelurahan Tanjung Mas).

## 1.2 Perumusan Masalah Masalah

### 1.2.1 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Kurangnya koordinasi pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan pemukiman kumuh.
2. Masih belum optimalnya collaborative governance dari peraturan walikota tentang pemukiman kumuh masih jauh dari harapan dengan kondisi jalan, sanitasi, pengelolaan sampah dan drainase lingkungan kepada masyarakat
3. Adanya proses kolaborasi belum berjalan baik karena butuh kontribusi dari masyarakat untuk menuntaskan Kawasan kumuh di Kelurahan tanjung mas.
4. Target penanganan pemukiman Penanganan Pemukiman kumuh belum tercapai

### 1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang dapat menjelaskan fokus masalah penelitian, maka rumusan permasalahan yang diteliti yaitu

1. Bagaimana Proses *Calloborative Governence* dalam penanganan Pemukiman Kumuh di Kelurahan Tajung Mas, Kecamatan Seamarang Utara, Kota Semarang ?
2. Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat proses *Calloborative Governence* dalam penanganan Pemukiman Kumuh di Kelurahan Tajung Mas, Kecamatan Seamarang Utara, Kota Semarang ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang akan diteliti, terdapat dasar dari penelitian yang dijelaskan dalam tujuan. Tujuan penelitian merupakan hal yang akan dicapai dari sebuah penelitian sejak dimulainya proses penelitian maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis Proses *Calloborative Governence* dalam penanganan Pemukiman Kumuh di Kelurahan Tajung Mas, Kecamatan Seamarang Utara, Kota Semarang ?

2. Menganalisis Faktor Pendukung dan Penghambat proses *Calloborative Governence* dalam penanganan Pemukiman Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Seamarang Utara, Kota Semarang ?

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian Penelitian mengenai proses *collaborative governance* dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

##### **1.4.1 Kegunaan Akademis**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana dalam melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, sistematis, dan kemampuan penulisan karya ilmiah dengan berpedoman pada kajian teori yang didapatkan dari Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.

##### **1.4.2 Kegunaan Teoritis**

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemangku kepentingan dalam proses *Collaborative governance* dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang.
  2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan dan pengetahuan tentang proses *Collaborative governance* dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang yang pada hakekatnya bermanfaat dan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.
- Kegunaan Praktis

##### **1.4.3 Kegunaan Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi memberikan kontribusi tentang penyelesaian permasalahan penanganan pemukiman kumuh dan mendukung mengenai penerapakan penanganan pemukiman kumuh melalui peraturan walikota Semarang.

## 1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu penelitian ini menggunakan ringkasan dari artikel penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti meliputi judul, peneliti, sumber jurnal, tujuan penelitian, temuan penelitian, dan perbedaan penelitian yang sudah diteliti yang akan diteliti.

Penelitian terdahulu digunakan untuk mengetahui penelitian sebelumnya dengan permasalahan yang sama agar nantinya dapat diketahui kesenjangan penelitiann yang dapat menjadi fokus dari penelitian selanjutnya. Penelitian terkait penanganan pemukiman kumuh belum pernah dilakukan observasi secara langsung pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Kelurahan dan warga Tanjung Mas. Penelitian terdahulu hanya membahas pada bidang penanganan bukan pada kebijakanya. pada penelitian terdahulu ini beberapa artikel yang dicantumkan terkait penanganan sampah dapat dijadikan kajian dan berkembang secara keilmuan.

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Imam Surya, Sanny Nofrima, Herdin Arie Saputra dan Niken Nurmiyati (2021). Dengan Judul “ Governance dalam pengelolaan wisata berkelanjutan di kabupaten kulon progo (studi kasus: wisata kebun teh nglinggo”. Tujuan Penelitian ini Untuk membahas antara sekto dalam pengelolaan wisata dalam pengembangan wisata ramah lingkungan dan pengelolaan destinasi wisata Kebun Teh Nglinggo. Hasil Penelitian Dengan adanya Wisata Kebun Teh Nglinggo Kabupaten Kulon Progo salah satu sumber pendapatan untuk masyarakat lokal dengan tingkat wisatawan berkunjung ke periwisata hingga juga meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Vojana, Delly, Maulana, dan Rachmi Yulianti (2021). Dengan Judul “ Kolaborasi Aktor dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di kacamatan kasemen Kota Semarang”. Tujuan penelitian ini Mendeskripsikan kolaborasi aktor dalam pelaksanaan kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh ( KOTAKU) di Kecamatan Kaseman Kota Semarang. Hasil Penelitian ini tentang Kesadaran dari pihak masyarakat akan kebersihan dan kurang merawat fasilitas yang telah dibangun, serta pihak BKM kurang berpartisipasi dengan optimal.

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Andi, Lestari dan Sulaiman (2021). Dengan judul “ Proses Kolaborasi Penanganan Pemukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Bandung ( Studi kasus : Kelurahan Tmansari Kecamatan Bandung Wetan ) “. Tujuan Penelitian ini Mendeskripsikan Proses Kolaborasi dan kendala

kolaborasi penanganan pemukiman kumuh melalui program KOTAKU di Kota Bandung. Hasil Penelitian Proses kolaborasi penanganan pemukiman kumuh program KOTAKU di Bandung belum optimal disebabkan masih tumpang tindih kepentingan, komunikasi tidak terarah dan pemahaman penerapan program rendah. Kendala internal yang dihadapi, meliputi komunikasi, belum terdapat kesetaraan, pemahaman bersama rendah, ego sektoral.

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Farid Zakky Yopiannor dan Novianto Eko Wibowo (2019). Dengan judul “ Collaboration Implementation of Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Program In Palangkaraya City “. Tujuan Penelitian ini Mendeskripsikan proses implemmentasi dari program KOTAKU dan dinamika dari aktor kolaborasi pada impelentasi Program KOTAKU di Kota Palangkaraya. Hasil Penelitian Kolaborasi kurang optimal karena dipengaruhi oleh karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Berdampak pada tindakan dan hasil kerja sama belum optimal. Dinamika Kolaborasi menunjukan siklus interaktif. Antara prinsip keterlibatan, motivasi bersama, dan kapasitas untuk aksi bersama berjalan dengan baik. Keterlibatan prinsip secara formal dibentuk melalui lokakarya dan musyawarah kemudian engagement berprinsip informal juga berbentuk melalui interaksi di grup Koordinasi Whatsapp.

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Novy Setia Yunas dan Faza Dhora Nailufur (2021). Dengan judul “collaborative governence melalui program kampung kb di kabupatenjombang“. Tujuan Penelitian ini Menjelaskan impelemntasi konsep Collaborative Governence dalam kebijakan kampung KB di Kabupeten Jombang. Hasil Penelitian Peningkatan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung diharapkan dapat dicapai melalui program Kampung KB melibatkan partisipasi elemen masyarakat sebagai implemmentator program KKBPK melalui konsep Collaborative Governence. Program Kampung KB dapat belum menjadi bagian dari perencanaan masyarakat setempat dan komunikasi dua arah terkait program juga belum tersedia.

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Yaskinul Anwar, setyasih dan Herlan (2021). Dengan judul “ Partisipasi Masyarakat Terhadap Penenganan Pemukiman Kumuh (Studi Kasus Di Kampung Ketupat Kecamatan Smarinda Seberang) “. Tujuan Penelitian ini Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat terhadapap penanganan pemukiman kumuh di kampung ketupat. Hasil Penelitian Kondisi Pemukiman kumuh di Kampung Ketupat dalam kondidi kumuh disebabkan pemerintah belum sepenuhnya menangani, penenganan sementara seperti perbaikan akses jalan dan pengecatan bagian dalam rumah, sedangkan rumah yang berada ditubuh sungai belumditangani. Tingkat partisipasi berdasarkan hasil

skor kuesioner dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil termasuk kategori sangat tinggi, sedangkan tahap evaluasi dan monitoring kategori tinggi. Partisipasi masyarakat masuk kategori sangat tinggi.

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Syahriar Tato (2021). Dengan judul “Penanganan Program KOTAKU Kelurahan Banggae Kabupetan Majen”. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Program KOTAKU mengevaluasi penanganan pemukiman kumuh dalam pelaksanaan program KOTAKU dan mengevaluasi perubahan manfaat dampak yang dihasilkan dari penanganan pemukiman kumuh dalam pelaksanaan program KOTAKU. Hasil Penelitian Terintegratif dan komprehensif dalam penyelesaian masalah dan kebutuhan Problem Solving berdampak pada pola pendekatan penanganan dan pilihan intervensi tidak efektif serta tidak tuntas. Evaluasi perubahan manfaat dan dampak menunjukan ragam permasalahan dihadapi belum sepenuhnya terentaskan yang paling menonjol adalah pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana dasar terutama jalan lingkungan dan drainase serta masih terdapat kesenjangan realisasi antar indikator.

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Andi Hariadi (2020). Dengan judul “Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Pasir Putih Bira Kabupaten Bulukumba “. Tujuan Penelitian ini Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Collaborative Governance dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih bira Kabupaten Bulukumba Metode penelitian ini menggunakan tipe fenomenologi untuk menemukan makna yang menggali data jenis penelitian kualitatif. Hasil Penelitian kolaborasi pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira Kabupaten Bulukumba masih kurang terlaksana dengan baik walaupun dalam pengungkapan sudah cukup baik karena melibatkan pihak kelompok sadar wisata namun kelompok ini secara kelembagaan tidak terlalu aktif, serta komunikasi belum berjalan dengan baik juga kurangnya kepercayaan antara kedua pihak dan komitmen mereka belum kuat walaupun dalam berkolaborasi sudah mengacu pada SK Kepala Dinas Pariwisata.

Berikut Tabel 6 dengan hasil tabel ringkasan penelitian terdahulu.

**Table 6 Penelitian Terdahulu**

| Judul Penelitian                                                                                                                                     | Peneliti dan Jurnal                                                                                                                                     | Tujuan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                              | Temuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kepariwisata Yang Berkelanjutan (Studi Pada Kegiatan Pesta Rakyat Simpedes Tahun 2019 Di Kabupaten Pati). | Peneliti: zahratun Aeni dan Retno Sunu Astuti (2019)<br>Jurnal : Conference on Public Administration and Society 1 (01) Volume 01, Nomor 01, Tahun 2019 | Mengidentifikasi sinergisitas pemerintah dan pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pelaksanaan rencana strategis pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Pati.                                                                                                | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pariwisata merupakan salah satu bidang yang sangat menjanjikan untuk mendukung pembangunan ekonomi suatu daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah dan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus memiliki sinergisitas dalam merumuskan perencanaan strategi dalam pengembangan pariwisata yang ada di daerah. | Penelitian ini membahas sinergitas pemerintah dan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam merumuskan perencanaan strategi dalam pengembangan pariwisata yang ada di daerah.                                                                                                                                                                 |
| Collaborative Governance Dalam Pengembangan Objek Wisata Toluk Jangkang Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.                                         | Peneliti : Aziz Ar Rasyid dan Adianto (2021)<br>Jurnal : <i>Journal Publicuho</i> (2021) 4(3)                                                           | Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep Collaborative Governance, pihak-pihak yang terlibat adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, PT Cosmic, dan Pokdarwis. Kolaborasi dilakukan untuk mengembangkan objek wisata toluk jangkang di Kecamatan Tualang Kabupaten siak. | penelitian ini menunjukkan bahwa wisata toluk jangkang merupakan wisata yang memiliki konsep berwisata memadukan diam dengan budaya lokal. Konsep Collaborative Governance sangatlah berperan penting karena dalam penerapannya tidak hanya melibatkan antara pemerintah dan non pemerintah saja melainkan pihak-pihak lain.                                                                  | Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat analisis deskriptif. hasil penelitian belum sepenuhnya terjaln kolaborasi antara Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, PT Cosmic, dan Pokdarwis ini dibuktikan masih minimnya biaya dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan wisata toluk jangkang. |
| COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN WISATA BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KULON PROGO (STUDI KASUS:                                               | Peneliti : Imam Surya, Sanny Nofrima, Herdin Arie Saputra dan Niken Nurmiyati<br>Jurnal : Jurnal Pemerintahan dan                                       | Tujuan penelitian ini Untuk membahas antara sektor dalam pengelolaan wisata dalam pengembangan wisata ramah lingkungan dan pengelolaan destinasi                                                                                                                               | Dengan adanya Wisata Kebun Teh Nglinggo Kabupaten Kulon Progo salah satu sumber pendapatan untuk masyarakat lokal dengan tingkat wisatawan berkunjung                                                                                                                                                                                                                                         | Penelitian ini menganalisis Collaborative Governance dalam Pengelolaan Wisata Berkelanjutan Khususnya di Wisata Kebun Teh Nglinggo                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WISATA KEBUN TEH NGLINGGO                                                                                                                                           | Politik Islam 190 Vol. 6, No. 2, 2021                                                                                                 | wisata Kebun Teh Nglingo.                                                                                                                           | ke pariwisata hingga juga meningkatkan pendapatan masyarakat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kabupaten Kulon Progo. Kemudian, penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif.                                                                                                                                        |
| Kolaborasi Aktor dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan kasemen Kota Semarang                                                   | Peneliti :<br>Vojana, Delly, Maulana, dan Rachmi Yulianti<br><br>Jurnal :<br>Ilmu Administrasi Negara (AsiAN) Vol. 9 No. 2            | Mendeskrripsikan kolaborasi aktor dalam pelaksanaan kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh ( KOTAKU) di Kecamatan Kaseman Kota Semarang.                | Kesadaran dari pihak masyarakat akan kebersihan dan kurang merawat fasilitas yang telah dibangun, serta pihak BKM kurang berpartisipasi dengan optimal.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Penelitian ini membahas peranan masing-masing aktor yang terlibat dalam proses kolaborasi pada penerapan program Kota Tanpa Kumuh.                                                                                           |
| Proses Kolaborasi Penanganan Pemukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Bandung ( Studi kasus : Kelurahan Tmansari Kecamatan Bandung Wetan ) | Peneliti :<br>Andi, Lestari dan Sulaiman<br><br>Jurnal :<br>Badan perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan pengembangan Kota Bandung. | Mendeskrripsikan Proses Kolaborasi dan kendala kolaborasi penanganan pemukiman kumuh melalui program KOTAKU di Kota Bandung.                        | Proses kolaborasi penanganan pemukiman kumuh program KOTAKU di Bandung belum optimal disebabkan masih tumpang tindih kepentingan, komunikasi tidak terarah dan pemahaman penerapan program rendah. Kendala internal yang dihadapi, meliputi komunikasi, belum terdapat kesetaraan, pemahaman bersama rendah, ego sektoral.                                                                                                                     | Penelitian terkait proses kolaborasi program KOTAKU penanganan pemukiman kumuh dan kendala yang terjadi dilapangan dengan lokus yang berbeda, yaitu di Kota Bandung                                                          |
| <i>Collaboration Implementation of Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Program In Palangkaraya City</i>                                                                       | Peneliti :<br>Farid Zakky Yopiannor, Novianto Eko Wibowo<br><br>Jurnal :<br>IAPA Proceedings Conference ( 2019)                       | Mendeskrripsikan proses implemementasi dari program KOTAKU dan dinamika dari aktor kolaborasi pada impelentasi Program KOTAKU di Kota Palangkaraya. | Kolaborasi kurang optimal karena dipengaruhi oleh karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Berdampak pada tindakan dan hasil kerja sama belum optimal. Dinamika Kolaborasi menunjukan siklus interaktif. Antara prinsip keterlibatan, motivasi bersama, dan kapasitas untuk aksi bersama berjalan dengan baik. Keterlibatan prinsip secara formal dibentuk melalui lokakarya dan musyawarah kemudian <i>engagement</i> berprinsip | Penelitian ini menjelaskan kolaborasi dalam penerapan program dari Kota Tanpa Kumuh dengan wilayah yang berbeda yaitu Plangkaraya . Penelitian ini juga menjelaskan terkait dinamika kolaborasi dan keterlibatan masyarakat. |

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                 | informal juga berbentuk melalui interaksi di grup Koordinasi <i>Whatsapp</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |
| <i>COLLABORATIVE GOVERNENCE</i><br>MELALUI PROGRAM KAMPUNG KB DI KABUPATENJOMBANG                                       | Peneliti :<br>Novy Setia Yunas dan Faza Dhora Nailufur.<br><br>Jurnal : CosmoGo V: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5, No. 2 (2019)                     | Menjelaskan implemntasi konsep <i>Collaborative Governence</i> dalam kebijakan kampung KB di Kabupeten Jombang. | Peningkatan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung diharapkan dapat dicapai melalui program Kampung KB melibatkan partisipasi elemen masyarakat sebagai implemementator program KKBPK melalui konsep <i>Collaborative Governence</i> . Program Kampung KB dapat belum menjedi bagian dari perencanaan masyarakat setempat dan komunikasi dua arah terkait program juga belum tersedia.                                                                                                                                     | Penelitaian ini membahas terkait permasalahan yang berbeda yaitu dalam penerapan kebijakan kampung KB di Kabupaten Jombang.                                            |
| Partisipasi Masyarakat Terhadap Penanganan Pemukiman Kumuh (Studi Kasus Di Kampung Ketupat Kecamatan Smarinda Seberang) | Peneliti :<br>Yaskinul Anwar, setyasih dan Herlan<br><br>Jurnal : <i>Journal of Education Humanior and Sosial Science (JEHSS)</i> Vol 4, No 1 (2021) | Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat terhadapap penanganan pemukiman kumuh di kampung ketupat.             | Kondisi Pemukiman kumuh di Kampung Ketupat dalam kondidi kumuh disebabkan pemerintah belum sepenuhnya menangani, penanganan sementara seperti perbaikan akses jalan dan pengecatan bagian dalam rumah, sedangkan rumah yang berada ditubuh sungai belumditangani. Tingkat partisipasi berdasarkan hasil skor kuesioner dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil termasuk kategori sangat tinggi, sedangkan tahap evaluasi dan monitoring kategori tinggi. Partisipasi masyarakat masuk kategori sangat tinggi. | Penelitaian ini membahas tentang peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam permasalahan yang penanganan lingkungan kumuh di kampung Ketupat Smarinda Seberang. |
| Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Pasir                                                      | Peneliti :<br>Andi Hariadi (2020)                                                                                                                    | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Collaborative                                                  | kolaborasi pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira Kabupaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses                                                                                                                       |

|                                |  |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Putih Bira Kabupaten Bulukumba |  | Governance dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih bira Kabupaten Bulukumba Metode penelitian ini menggunakan tipe fenomenologi untuk menemukan makna yang menggali data jenis penelitian kualitatif | Bulukumba masih kurang terlaksana dengan baik walaupun dalam pengungkapan sudah cukup baik karena melibatkan pihak kelompok sadar wisata namun kelompok ini secara kelembagaan tidak terlalu aktif, serta komunikasi belum berjalan dengan baik juga kurangnya kepercayaan antara kedua pihak dan komitmen mereka belum kuat walaupun dalam berkolaborasi sudah mengacu pada SK Kepala Dinas Pariwisata | Collaborative Governance dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih bira Kabupaten Bulukumba Metode penelitian ini menggunakan tipe fenomenologi untuk menemukan makna yang menggali data jenis penelitian kualitatif |
|--------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sumber : Diolah Peneliti

Tinjauan Pustaka digunakan untuk mengetahui penelitian sebelumnya dengan permasalahan yang sama agar nantinya dapat diketahui kesenjangan penelitian yang dapat menjadi fokus dari penelitian selanjutnya. Penelitian terkait *collaborative governance* terkait permasalahan permukiman kumuh pernah dilakukan beberapa penelitian dengan perbedaan dari setiap penelitiannya. Pada tinjauan pustaka ini beberapa artikel terkait dengan penanganan permukiman kumuh dapat dijadikan kajian dan berkembang secara keilmuan, Oleh karena itu, bisa di tarik kesimpulan bahwa penelitian yang akan dikerjakan tergolong masih baru serta belum pernah dikerjakan peneliti terdahulu.

## 1.6 Kajian Teori

### 1.6.1 Administrasi Publik

Menurut Pifner dan Presthus dalam Syafiie (2013:31) memberikan penjelasan mengenai administrasi negara sebagai berikut:

1. Administrasi Negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
2. Administrasi Negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.

3. Secara ringkas, administrasi Negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap sejumlah orang.

Sedangkan menurut Nigro bersaudara dalam Syafiie (2010:24), pengertian 1. Administrasi Publik sebagai berikut:

1. Administrasi Publik adalah suatu kerjasam kelompok dalam lingkungan pemerintah.
2. Administrasi publik meliputi ketiga cabang pemerintahan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta hubungan diantara mereka.
3. Administrasi publik mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah dan karenanya merupakan bagian dari proses politik.
4. Administrasi publik sangat erat kaitanya dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.
5. Administrasi publik dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perorangan.

### **1.6.2 Paradigma Administrasi Publik**

Berbicara mengenai administrasi publik maka tidak terlepas dari pergeseran paradigma administrasi publik yang terjadi selama ini. Pergeseran tersebut dikarenakan paradigma sebelumnya mengalami berbagai masalah dan dipandang sudah tidak relevan dengan situasi saat ini bahkan membuat orang tidak lagi percaya pada paradigma yang ada yang kemudian berusaha membangun paradigma baru. Terkait dengan pembahasan paradigma maka Thomas S. Khun (Syafiie, 2010:26) mengatakan bahwa paradigma adalah suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau cara memecahkan suatu masalah, yang dianut suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu. Lebih ringkasnya paradigma merupakan corak

Nicholas Henry dalam Keban (2014:31-33) mengungkapkan bahwa terdapat lima paradigma Administrasi Negara yang diuraikan seperti berikut ini:

1. Paradigma 1: Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)  
Woodrow mengungkapkan bahwa politik harus memusatkan perhatiannya pada kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat, sedang administrasi memberi perhatiannya pada pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan tersebut. Pemisahan antara politik dan administrasi dimanifestasikan oleh pemisahan antara badan legislatif, eksekutif dan

judikatif. Pada paradigma ini, administrasi harus dipandang sebagai sesuatu yang bebas nilai dan diarahkan untuk mencapai nilai efisiensi dan ekonomi dari government bureaucracy. Paradigma ini lebih menekankan pada lokus saja yaitu “government bureaucracy” namun kurang menekankan pada fokus.

2. Paradigma 2: Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1937)

Dalam paradigma ini yang menjadi fokus adalah prinsip-prinsip administrasi yang dikemukakan oleh Gulick dan Urwick yaitu: Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting Budgeting. Prinsip-prinsip administrasi tersebut diperkenalkan sebagai fokus administrasi publik yang dapat diterapkan dimana saja atau bersifat universal sementara lokus dari administrasi publik dinilai kurang jelas sebab prinsip tersebut dapat diterapkan baik pada organisasi pemerintah maupun organisasi swasta.

3. Paradigma 3 : Administrasi sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Morstein-Marx seorang editor buku “Elements of Public Administration” di tahun 1946 mempertanyakan pemisahan politik dan administrasi sebagai suatu yang tidak mungkin atau tidak realistis, sementara Herbert Simon mengarahkan kritiknya terhadap ketidakkonsistenan prinsip administrasi, dan menilai bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak berlaku universal. Dalam konteks ini, administrasi negara bukannya value free atau dapat berlaku dimana saja, tapi justru dipengaruhi nilai-nilai tertentu. Disini terjadi pertentangan antara anggapan mengenai value free administration di satu pihak dengan anggapan akan value laden politics lain pihak.

4. Paradigma 4: Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Dalam paradigma ini prinsip-prinsip manajemen yang pernah populer sebelumnya dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Terdapat dua arah perkembangan pada paradigma ini yaitu ilmu administrasi murni yang didukung oleh disiplin psikologi sosial dan yang berorientasi pada kebijakan publik. Fokus pada paradigma ini adalah perilaku organisasi, analisis manajemen, dan penerapan teknologi modern yang diasumsikan dapat diterapkan baik pada dunia bisnis maupun dunia administrasi publik sehingga lokus menjadi tidak jelas.

5. Paradigma 5: Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970 - ?)

Paradigma ini telah memiliki fokus dan lokus yang jelas. Fokus Administrasi Publik dalam paradigma ini adalah teori organisasi, teori manajemen dan kebijakan publik sedangkan lokus nya adalah masalah-masalah dan kepentingan publik. Ikeanyibe dkk (2017) menambahkan paradigma Administrasi Negara yang ke-6 (enam) yang diuraikan seperti berikut ini:

#### 6. Paradigma 6 : Governance (1990-sekarang)

Konsep paradigma ini merupakan penerjemahan baru dan aplikasi dari akhir tahun 1980 sampai 1990. Menurut Tamayan (dalam Ikeanyibe dkk, 2017), konsep ini dapat dikatakan sebagai praktik dari kekuasaan dan wewenang yang dilakukan oleh para pimpinan politik untuk kesejahteraan warga negara, proses kompleks dimana beberapa sektor masyarakat memegang kekuasaan, dan memberlakukan serta mengumumkan kebijakan publik yang secara langsung mempengaruhi interaksi manusia dan kelembagaan, ekonomi, serta perkembangan sosial.

#### 1.6.3 Manajemen Publik

Secara etimologi manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur. Dengan manajemen, sebuah pekerjaan akan jauh lebih mudah karena manajemen akan mengatur pembagian pekerjaan berdasarkan spesialisasi seseorang.

Menurut Chester I Barnard (dalam Firmasnyah, 2018: 2) mendefinisikan manajemen merupakan sebuah seni dan juga ilmu. Seni yang terkandung di dalam manajemen memiliki fungsi untuk mengupayakan tercapainya suatu tujuan sehingga memperoleh hasil yang bermanfaat. Ilmu di dalam manajemen memiliki fungsi dalam memaparkan peristiwa, gejala, dan segala hal dalam bentuk pendeskripsian.

Menurut Manullang (dalam Suprihanto, 2018: 4), definisi dari manajemen lebih mengarah pada seni dan ilmu dalam menyusun rencana, mengorganisasi pekerjaan, penggolongan, membuat sebuah perintah kerja, serta melakukan pengawasan di dalam sumber daya alam dan sumber daya manusia guna tercapainya tujuan dari suatu kerja. Menurut Encyclopedia of the Social Sciences (dalam Firmasnyah, 2018:1), memaparkan di dalam sebuah manajemen terdapat upaya dalam memperoleh hasil dan mewujudkan tujuan secara terstruktur dan terorganisir.

Menurut Mary Parker Follet (dalam Hariani, 2013:6), manajemen dapat dikatakan sebuah seni dalam menjalankan suatu pekerjaan. Berdasarkan pendefinisi inilah, manajemen bertujuan untuk mengadakan pengaturan perihal mencapai suatu tujuan kerja, sehingga terlihat di dalam manajemen suatu pekerjaan tidak dapat diselesaikan secara individual.

Menurut Haiman (dalam Firmansyah, 2018: 1-2) memaparkan fungsi dari sebuah manajemen ialah mencapai tujuan kerja dan pengawasan akan pekerjaan seorang individu di dalam suatu kelompok yang memiliki tujuan yang sama.

Menurut George R Terry (dalam Suprihanto, 2018: 2), manajemen ialah sebuah rancangan kerja yang dipengaruhi berbagai arahan dari sebuah kelompok berdasarkan satu tujuan organisasi. Terry menitikberatkan manajemen perihal upaya pencapaian hasil dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan setiap ilmu dan seni bersama-sama dan selanjutnya menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan.

Menurut Shafritz dan Russel (dalam Keban, 2014:85) manajemen merujuk pada bentuk pertanggungjawaban sebuah organisasi dalam mengelola sumber daya yang ada guna mencapai sebuah tujuan yang ditetapkan di dalam organisasi.

Overman (dalam Keban, 2014: 92-93) memaparkan manajemen publik merupakan suatu cabang ilmu yang memiliki aspek general di dalam suatu organisasi dan dipadukan dengan fungsi manajemen seperti planning, organizing, dan controlling di satu sisi, dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi dan politik di sisi lain. Sehingga manajemen publik ialah upaya mengelola sumber daya yang ada berdasarkan perintah yang dipaparkan di dalam kebijakan publik.

Overman menitikberatkan manajemen ke dalam upaya mengelola sumber daya berdasarkan kebijakan yang telah ditentukan. Berdasarkan pemaparan tersebut, manajemen lebih menekankan kaitan manajemen publik dengan sifatnya sebagai sebuah cabang studi dan perlu adanya penerapan governance untuk mencapai keputusan dan penerapannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama.

#### **1.6.4 Good Governanace**

Good governance atau yang sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik merupakan suatu perubahan paradigma dalam pemerintahan pasca reformasi yang cenderung lebih efektif dan lebih demokratis dengan menuntut adanya praktek pemerintahan yang lebih baik, yang membuka peran serta masyarakat. Tujuan utama dari good governance ialah tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar negara, masyarakat madani, lembaga-lembaga masyarakat dan pihak swasta. Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik (good governance). adalah terciptanya citra pemerintahan yang demokratis dimana setiap masyarakat diberikan kebebasan berpendapat (Ahmad Yani, 2022). Istilah governance bukan hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan, melainkan juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan dan bisa juga diartikan

pemerintahan. Oleh karena itu tidak mengherankan jika terdapat istilah public governance, private governance, corporate governance dan banking governance. Governance sebagai terjemahan dari pemerintahan kemudian berkembang dan menjadi populer dengan sebutan pemerintahan, sedangkan praktik terbaiknya disebut pemerintahan yang baik (*good governance*) (Aguswan, 2023)

Konsep “*Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik)” hakikatnya menunjukkan suatu perbedaan secara signifikan antara berbagai kelompok perilaku dalam pemerintahan (Susanto S.N.H, 2019). *Good governance* adalah suatu sikap yang kekuasaan pemerintah dipegang oleh masyarakat dengan tetap berada dibawah pengawasan dan diatur oleh pemerintah. Dalam hal pelaksanaannya, pola kerja pemerintahan harus berjalan secara efektif dan efisiensi, transparansi, responsif dan adanya partisipasi dari masyarakat. Pemerintah bersinergi dengan masyarakat, senantiasa menampilkan dirinya menjadi pihak yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat, maka pemberian pelayanan publik merupakan sebuah hal yang wajib dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintahan mengingat bahwa kualitas pelayanan publik merupakan nilai pondasi dalam terwujudnya *good governance* (Shafira Zalsabilah Arifah, 2022).

*Good governance* dapat dianggap sebagai suatu konsep ideologi politik yang memuat seluruh kaidah pokok yang harus dijadikan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara (Muhammad Mudhofar, 2022).

Penerapan *good governance* adalah merupakan suatu kebutuhan mutlak mayoritas rakyat demi terciptanya sebuah sistem politik pemerintahan yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara universal. Hal ini dapat pula menjadi suatu faktor pendorong terwujudnya *political governance* yang menghendaki bahwa berbagai proses pemerintahan baik itu dari segi proses perumusan kebijakan publik, penyelenggaraan pembangunan, pelaksanaan birokrasi publik pemerintahan agar dapat berjalan secara transparan, efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Tomuka, 2013).

### **1.6.5 Collaborative**

Berdasarkan paradigma terakhir dari administrasi publik yaitu governance Carlos Santiso dalam Haris (2019) menjelaskan bahwa pada awal konsep governance dalam agenda pembangunan memberikan gambaran adanya kekhawatiran terhadap efektivitas bantuan yang bertujuan utama mengurangi kemiskinan dan penderitaan manusia.

Menurut Chema dalam Keban (2008:38), governance merupakan adalah sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan yang terkait pada permasalahan ekonomi, sosial, politik dikelola menggunakan komunikasi yang baik dengan masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Maka dari itu, organisasi dari governance meliputi tiga domain yaitu state (negara atau pemerintah), private sector (sektor swasta atau dunia usaha), dan society (masyarakat) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing (Sedarmayanti, 2003:5).

Istilah governance lambat laun mulai bergeser menuju good governance berdasarkan pidato yang disampaikan oleh Presiden Amerika ke-28 yaitu Woodrow Wilson. Good governance sendiri menurut Kharisma (2014) menjelaskan bawah hal tersebut merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar bagi suatu negara dalam menghadapi permasalahan global dengan memperbaiki pemerintahan dalam mengurus kepentingan masyarakatnya.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas pemahaman governance berkaitan dengan penelitian ini adalah segala sesuatu tentang permasalahan publik yang dikelola oleh seluruh aktor yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan Adanya konsep collaborative governance menjadikan pemerintah tidak lagi aktor utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, urusan-urusan publik dan harus adanya collaborative governance oleh aktor-aktor yang terlibat untuk menuntaskan semua permasalahan yang ada di masyarakat.

Berdasarkan paradigma terakhir dari administrasi publik yaitu governance Carlos Santiso dalam Haris (2019) menjelaskan bahwa pada awal konsep governance dalam agenda pembangunan memberikan gambaran adanya kekhawatiran terhadap efektivitas bantuan yang bertujuan utama mengurangi kemiskinan dan penderitaan manusia.

Menurut Chema dalam Keban (2008:38), governance merupakan adalah sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan yang terkait pada permasalahan ekonomi, sosial, politik dikelola menggunakan komunikasi yang baik dengan masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Maka dari itu, organisasi dari governance meliputi tiga domain yaitu state (negara atau pemerintah), private sector (sektor swasta atau dunia usaha), dan society (masyarakat) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing (Sedarmayanti, 2003:5).

Istilah governance lambat laun mulai bergeser menuju good governance berdasarkan pidato yang disampaikan oleh Presiden Amerika ke-28 yaitu Woodrow Wilson. Good governance sendiri menurut Kharisma (2014) menjelaskan bawah hal tersebut merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar bagi suatu negara dalam menghadapi permasalahan global dengan memperbaiki pemerintahan dalam mengurus kepentingan masyarakatnya.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas pemahaman governance berkaitan dengan penelitian ini adalah segala sesuatu tentang permasalahan publik yang dikelola oleh seluruh aktor yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan Adanya konsep collaborative governance menjadikan pemerintah tidak lagi aktor utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, urusan-urusan publik dan harus adanya collaborative governance oleh aktor-aktor yang terlibat untuk menuntaskan semua permasalahan yang ada di masyarakat.

#### **1.6.5.1 Collaborative Governance**

Jung et al., (2009:1) menjelaskan bahwa *collaborative governance* adalah suatu proses dalam membentuk, mengemudikan, memfasilitasi, mengoperasionalkan serta memotivasi pengelolaan organisasi antar sektor dalam menyelesaikan permasalahan dari kebijakan publik yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu organisasi.

Proses kolaborasi tersebut adalah *collaborative governance* yang diartikan sebagai proses dan struktur dari kebijakan publik yang dibuat serta manajemen yang melibatkan masyarakat dengan batas-batas lembaga publik pada tingkatan pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam melaksanakan kepentingan bagi seluruh pihak yang diperlukan adanya pelibatan sektor swasta dan masyarakat (Emerson, Nabatchi & Balogh, 2012)

Ansell dan Gash (2008) *Collaborative Governance* dapat dikatakan sebagai salah satu dari tipe governance yang mana keseluruhan aktor yakni publik dan swasta bekerja sesuai tugas dengan melalui proses tertentu yang mana nantinya menghasilkan suatu kebijakan yang baik untuk masyarakat. Konsep tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah dan organisasi bisnis tidak bekerja dengan sendiri-sendiri melainkan bekerjasama dalam mencapai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Dari berbagai pendapat beberapa tokoh yang berkaitan dengan penelitian ini, maka *collaborative governance* dapat diartikan suatu proses yang melibatkan berbagai sektor yang meliputi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menghadapi permasalahan publik agar tercapainya kepentingan masyarakat.

Konsep dan definisi tersebut banyak dijadikan acuan oleh akademisi lainnya dalam membahas *collaborative governance* hingga Emerson, Nabatchi dan Balogh (Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2012) menawarkan definisi yang lebih luas yaitu sebagai proses dan struktur dari pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan masyarakat secara konstruktif antar badan-badan publik, berbagai level pemerintahan dan

atau pada ranah publik, privat dan sipil untuk melaksanakan suatu tujuan publik yang tidak dapat dicapai kecuali oleh forum bersama.

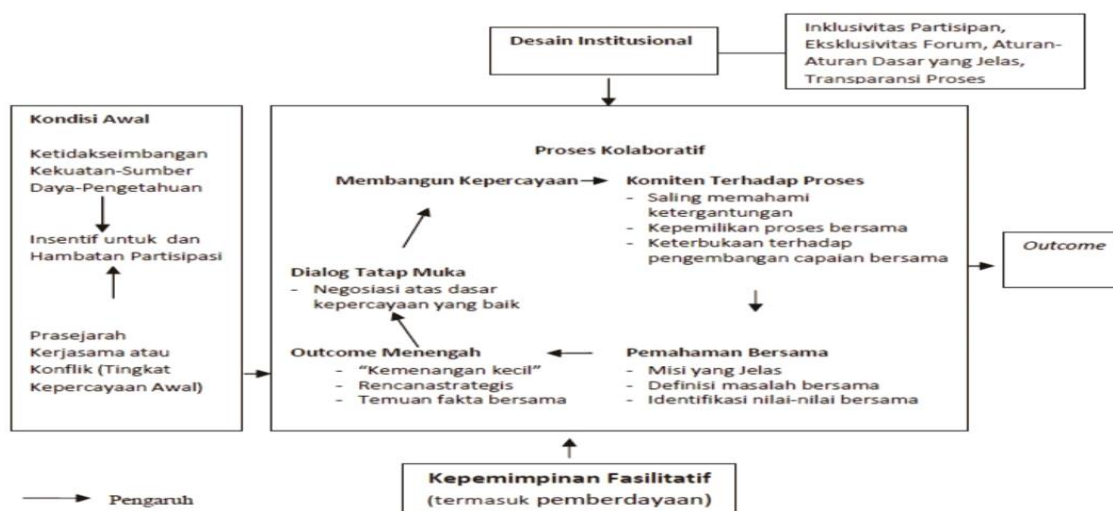
Blomgren Bingham, 2010 “Collaborative means to co-labor to achieve common goals working across boundaries in multisector and multiactor relationships”. Bingham menggambarkan makna *collaborative* yang melibatkan beberapa aktor yang saling membantu satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu, aktor-aktor ini bekerja tidak hanya dalam satu sektor melainkan di beberapa sektor. Sedangkan governance merupakan suatu sistem pemerintahan. Maka dari itu, *collaborative governance* adalah sistem pemerintahan yang menggunakan metode kolaborasi dengan melibatkan state dan non-state yang bekerja dalam beberapa sektor untuk mencapai tujuan bersama (Blomgren Bingham, 2010).

### 1.6.5.2 Model dan Proses Collaborative

#### 1. Kolaborasi menurut Ansell dan Gash (2008)

Ansell dan Gash (2008:550) menjelaskan bahwa kolaborasi terbagi menjadi dua, yaitu kolaborasi normatif dan proses. Kolaborasi normatif merupakan pendapat dengan tujuan dalam mencapai interaksi dengan mitra, sedangkan kolaborasi proses merupakan rangkaian proses yang mengatur seluruh pihak meliputi pemerintah dan *stakeholder* terkait agar kolaborasi ini merujuk pada organisasi pemerintah dan non pemerintah sesuai dengan kepentingannya. Pada teori Ansell dan Gash (2008) terkait *collaborative governance* merupakan suatu system yang terbagi atas beberapa tahapan, yaitu kondisi awal, design kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaborasi yang ditunjukkan pada sebagai Berikut.

**Gambar 6 Model Collaborative Governance Ansell dan Gash**



Sumber : Ansell dan Gash (2008)

Berdasarkan model tersebut diketahui bahwa kondisi awal organisasi berpengaruh terhadap adanya proses kolaborasi yang dilaksanakan yang memiliki beberapa variabel yaitu ketidakseimbangan antar kekuatan, sumber daya dan pengetahuan dari *stakeholder*, dan sejarah masa lalu. Bagian selanjutnya adalah desain kelembagaan yang mana di dalamnya terdapat aturan ataupun legitimasi dalam kolaborasi. Bagian ketiga yaitu kepemimpinan menjadi hal yang penting dalam membuat ataupun melaksanakan peraturan. Bagian selanjutnya adalah proses kolaboratif yang mencakup dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen untuk proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara. Tahapan dari proses kolaborasi sangat penting dalam pengelolaan urusan publik sebagai strategi. Proses kolaborasi dilaksanakan atas dasar tujuan dari kolaborasi pada masing masing aktor yang terlibat.

Model Collaborative Governance menurut Ansell dan Gash (Ansell & Gash, 2008) terdiri atas beberapa tahap yaitu:

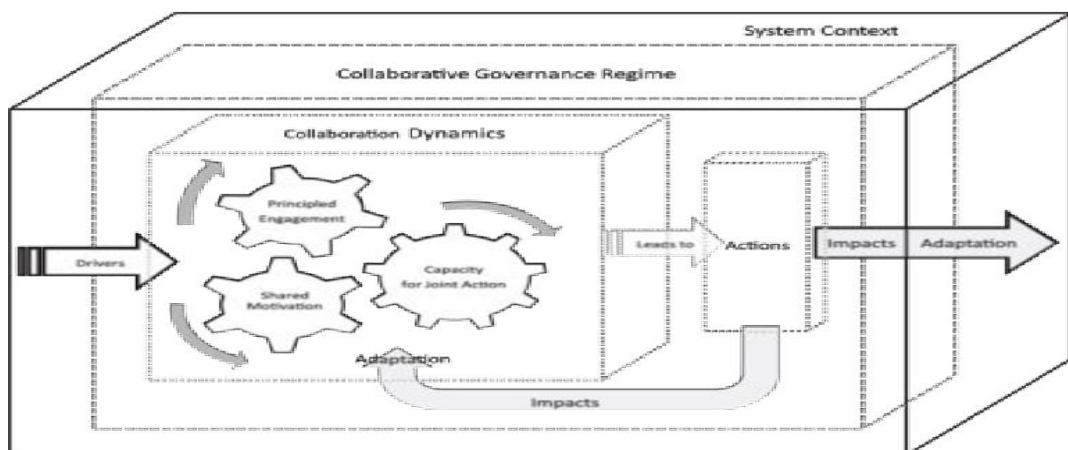
1. Starting Condition (Kondisi Awal) Pada tahap kondisi awal dalam relasi antar stakeholder, masingmasing aktor memiliki latar belakang yang berbeda yang dapat menghasilkan sebuah bentuk hubungan asimetris dalam relasi yang dijalankan.
2. Kepemimpinan Fasilitatif Ryan dalam Ansell dan Gash mengidentifikasi tiga komponen kepemimpinan kolaboratif yang efektif, yaitu:
  - a. Manajemen yang cukup terhadap proses kolaborasi;
  - b. Pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis;
3. Desain institusional (Institutional Design) Ansell dan Gash mendeskripsikan bahwa Desain Institusional mengacu pada protokol dasar dan aturan-aturan dasar untuk kolaborasi secara kritis yang paling ditekankan adalah legitimasi prosedural dalam proses kolaborasi. Dalam proses kolaborasi yang harus ditekankan adalah pemerintah harus bersifat terbuka dan inklusif.
4. Proses Kolaborasi (Collaborative Process) Model proses kolaborasi mengembangkan kolaborasi sebagai perkembangan tahapan. Gray dalam Ansell dan Gash mendefinisikan tiga tahapan proses kolaborasi antara lain problem setting (penentuan permasalahan), Direction Setting (penentuan tujuan), dan implementasi. Tahapan membentuk kolaboratif sebagai berikut: Proses *collaborative governance* dari Anshell dan Gash (2007:550) yang meliputi face to face dialogue (dialog/tatap muka) adalah hal utama dari proses kolaborasi dalam membangun kepercayaan, saling menghormati, pemahaman bersama, dan komitmen terhadap proses. Trust building (membangun kepercayaan) antara *stakeholder* meliputi partisipasi keterbukaan informasi antar

stakeholders apabila sebelumnya memiliki riwayat hubungan yang kurang bagus maka pentingnya membangun kepercayaan dari *stakeholder* dapat meminimalisir adanya tindakan yang tidak diinginkan. Commitment to process (komitmen bersama) berkaitan erat dengan motivasi bagi para *stakeholder* untuk berpartisipasi dalam hal ini komitmen untuk proses kolaboratif membutuhkan kesediaan mematuhi hasil musyawarah, bahkan jika mereka harus mengikuti *stakeholder* yang tidak mereka dukung, serta kesediaan seseorang untuk memihak atau terlibat dalam suatu proses tertentu. Dalam konteks organisasi, komitmen mengacu pada niat dan keterikatan individu untuk memelihara keanggotaannya dalam organisasi komitmen ini berkaitan erat dengan bagaimana seseorang berperan aktif dan bertanggung jawab dalam menjalankan proses-proses yang ada. Shared understanding (pemahaman bersama) merupakan hal yang harus dikembangkan terkait hal apa yang mereka dapat dicapai bersama secara kolektif meliputi persamaan visi, misi dan tujuan yang jelas dan arah strategis program yang dilaksanakan. Intermediate outcome (pencapaian hasil) merupakan bagian dari tercapainya tujuan dan keuntungan dari kolaborasi antar stakeholders.

2. Kolaborasi menurut Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012) Emerson,

Nabatchi, & Balogh (2012) menjelaskan terkait kerangka kerja integratif dari sistem collaborative governance yang dibagi menjadi tiga bagian yang meliputi sistem context, collaborative governance regime, dan collaboration dynamics. Pada proses kolaborasi dari Emerson dijelaskan melalui collaborative governance regime yang terdiri atas dinamika kolaborasi, tindakan kolaborasi, dan dampak sementara dari proses kolaborasi. Berikut adalah gambar Model 6 yang menunjukkan sistem dari collaborative governance menurut Emerson Nabatchi dan Balogh.

**Gambar 7 Model Collaborative Governance Emerson, Nabatchi, & Balogh**



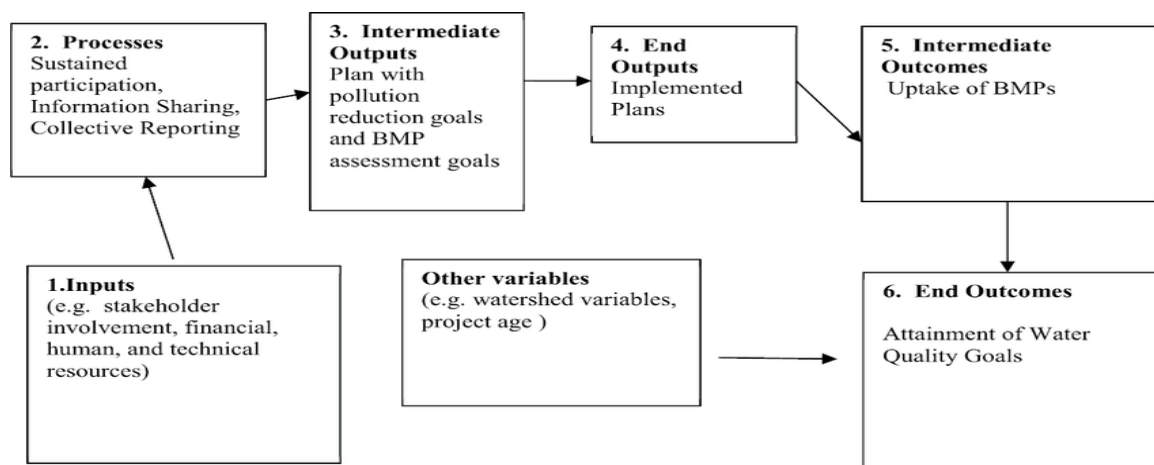
Sumber : Emerson, Nabatchi, & Balogh ( 2012 )

Berkaitan dengan collaborative governance regime yang memiliki 3 bagian dalam pelaksanaan. Pada tahapan awal yaitu dinamika kolaborasi ini memiliki beberapa variabel yaitu keterikatan prinsip merupakan penegasan tujuan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh aktor yang terlibat, motivasi bersama merupakan penguatan kepercayaan dan pemahaman terkait tujuan yang akan dicapai, dan kapasitas bersama merupakan penegasan tujuan terhadap hasil yang diinginkan dengan upaya peningkatan kapasitas secara bersama-sama.

### 3. Kolaborasi menurut Biddel dan Koontz (2014)

Biddel dan Koontz (2014) menggambarkan tata kelola dari kolaboratif dengan memisahkan indikator keluaran yang terbagi atas enam komponen yang meliputi komponen input, proses, intermediate output dan end output, serta intermediate outcome dan end outcome. Berikut adalah Gambar 8 yang menunjukkan sistem dari collaborative governance menurut Biddel dan Koontz.

**Gambar 8 Model Collaborative Governance Biddel dan Koontz (2014)**



Sumber: Bidel dan Koontz (2014)

Komponen input pada penelitian Bidel dan Koontz (2014) misalnya keterlibatan dari pemangku kepentingan, keuangan, sosial, dan sumber daya teknis. Komponen proses menjelaskan unsur yang terkait yaitu partisipasi berkelanjutan, berbagi informasi, dan pelaporan kolektif. Komponen intermediate output dan end output pada bagian intermediate ini menjelaskan tentang perencanaan yang telah dibuat dan diselesaikan oleh organisasi, sedangkan end output ini mengarah pada penerapan dari perencanaan yang telah dibuat. Komponen intermediate outcome ini menjelaskan tentang perencanaan dari komponen proses yang mana nantinya akan diawasi dan dievaluasi serta pada end outcome

ini menghasilkan variabel lain seperti perubahan pola dari penggunaan sumber daya ataupun perubahan dari lingkungan.

#### **1.6.5.3 Faktor Pendukung dan Penghambat**

Suatu proses kolaborasi selalu mengalami beragam faktor terutama pada faktor struktur sosial, faktor kultural, dan faktor kepentingan yang mana pemerintah mendominasi sehingga berdampak terhadap kegagalan sebuah kolaborasi dari keseluruhan *stakeholder* (Septiani et al., 2021). Faktor pendukung dan penghambat pada proses kolaborasi bertujuan untuk mengetahui berbagai hal yang dapat diketahui proses kolaborasi berjalan dengan baik atau tidaknya. Faktor pendukung dan penghambat proses kolaborasi adalah faktor yang mempengaruhi proses kolaborasi dengan beberapa fenomena berikut.

##### **a. Struktur Sosial**

Faktor struktur sosial menjadi salah satu yang mempengaruhi proses kolaborasi. Pada struktur sosial terpacu hubungan antar *stakeholder* dalam proses kolaborasi. Struktur sosial ini sendiri berkaitan tentang struktur perencanaan, struktur tugas dan fungsi *stakeholder* sehingga menjelaskan hubungan kolaborasi.

##### **b. Kultural**

Pada faktor ini sangat berkaitan dengan budaya yang dilakukan dalam kolaborasi. Dari hasil penelitian masyarakat yang berada disekitar wilayah pemukiman kumuh memiliki budaya atau kebiasaan yang menjadi masalah nyata dalam proses kolaborasi penanganan Pemukiman Kumuh..

##### **c. Kepentingan pemerintah**

Faktor kepentingan pemerintah sangat berkaitan dengan kepentingan politik antar *stakeholder* yang berkolaborasi. Salah satu bentuk kepentingan pemerintah ialah dengan adanya pembuatan kebijakan ataupun program tertentu.

#### **1.6.5.4 Pemukiman kumuh**

Menurut Krisandriyana dkk. (2019) menjelaskan bahwa permukiman kumuh pada umumnya masih banyak berada di kawasan perkotaan yang disebabkan adanya keterbatasan dari tenaga kerja yang menyebabkan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut mendirikan bangunan tanpa memperhatikan standarisasi yang tepat sehingga

mengakibatkan kawasan masih terdapat dalam kategori kotor dan memiliki status kepemilikan lahan yang kurang jelas. kumuh yang memiliki kualitas lingkungan yang tidak sehat dan masih terdapat dalam kategori kotor dan memiliki status kepemilikan lahan yang kurang jelas.

Menurut Pujiyono & Subiyakto (2021) menjelaskan bahwa permukiman kumuh adalah suatu kondisi perumahan yang masih berada di bawah standarisasi kelayakan dengan tingkat kepadatan yang tinggi serta kualitas lingkungan yang tidak sehat yang disebabkan kurangnya perencanaan kota dan kebijakan permukiman sehingga menimbulkan terjadinya permukiman kumuh. kemudian bergeser fungsi sebagai tempat usaha sehingga penggunaan bangunannya sebagai tempat hunian, tempat usaha atau tempat campuran.

#### **1.6.5.5 Penanganan pemukiman kumuh**

Menurut Ditjen Cipta Kerja, penanganan terhadap permukiman kumuh ini diutamakan bagi wilayah yang masih berada dekat dengan pusat perkotaan dengan pengembangan kawasan kumuh antara lain yaitu: Perbaikan Jalan , Jaringan drainase, Pengelolaan sampah, Pengelolaan sanitasi, Penyediaan air minum

Menurut Ervianto I. & Felasari (2019) menjelaskan bahwa kegagalan dari penanganan permukiman kumuh disebabkan perspektif terhadap penyelesaian masalah hanya terfokus pada penataan spasial permukiman kumuh dengan pengabaian hak atas papan dengan tanggung jawab pemangku kepentingan. Pengentasan dari permasalahan permukiman kumuh di perkotaan dapat diawali dengan mengubah permukiman kumuh menjadi permukiman produktif dengan menciptakan lingkungan yang memiliki nilai tambah perekonomian bagi masyarakat miskin dalam memberikan kontribusi dalam menjaga lingkungan dengan bertujuan pada potensi kota berkelanjutan.

#### **1.7 Oprasional Konsep**

1. Proses *Collaborative Governance* dalam Penanganan Pemukiman Kumuh di Kelurahan Tajung Mas, Kecamatan Seamarang Utara, Kota Semarang merupakan suatu kolaborasi antara pemerintah dengan *stakeholders* dalam rangka penanganan Kumuh sebagai berikut.
  - a. Face to face dialogue (dialog tatap muka)

Dialog tatap muka bertujuan untuk mengetahui proses kolaborasi dalam penanganan permukiman kumuh yang dilakukan melalui komunikasi antar *stakeholders* secara langsung melalui berbagai kegiatan.

b. Trust building (membangun kepercayaan)

Membangun kepercayaan adalah proses lanjutan dari kolaborasi dengan pemimpin kolaborasi bertanggung jawab dalam membangun kepercayaan antar *stakeholders*

c. Commitment to process (komitmen terhadap proses)

Komitmen antar *stakeholders* merupakan tanggung jawab terhadap tujuan dan kesadaran dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan Penanganan lingkungan kumuh.

d. Shared understanding (berbagi pemahaman)

Berbagi pemahaman merupakan tahapan selanjutnya setelah komitmen dalam proses yaitu dengan menentukan tujuan secara bersama-sama dalam penanganan lingkungan kumuh..

e. Intermedite Outcome (hasil sementara)

Hasil sementara merupakan tercapainya tujuan dari proses kolaborasi yang dapat dirasakan secara langsung walaupun minim tapi dapat memberikan dorongan dalam membangun kepercayaan dan komitmen dalam perumusan kegiatan dan rencana program Pengelolaan desa wisata.

2. Faktor pendukung dan penghambat proses kolaborasi adalah faktor yang mempengaruhi proses kolaborasi dengan beberapa fenomena berikut.

a. Struktur Sosial

Faktor struktur sosial menjadi salah satu yang mempengaruhi proses kolaborasi. Pada struktur sosial terpacu hubungan antar *stakeholder* dalam proses kolaborasi. Struktur sosial ini sendiri berkaitan tentang struktur perencanaan, struktur tugas

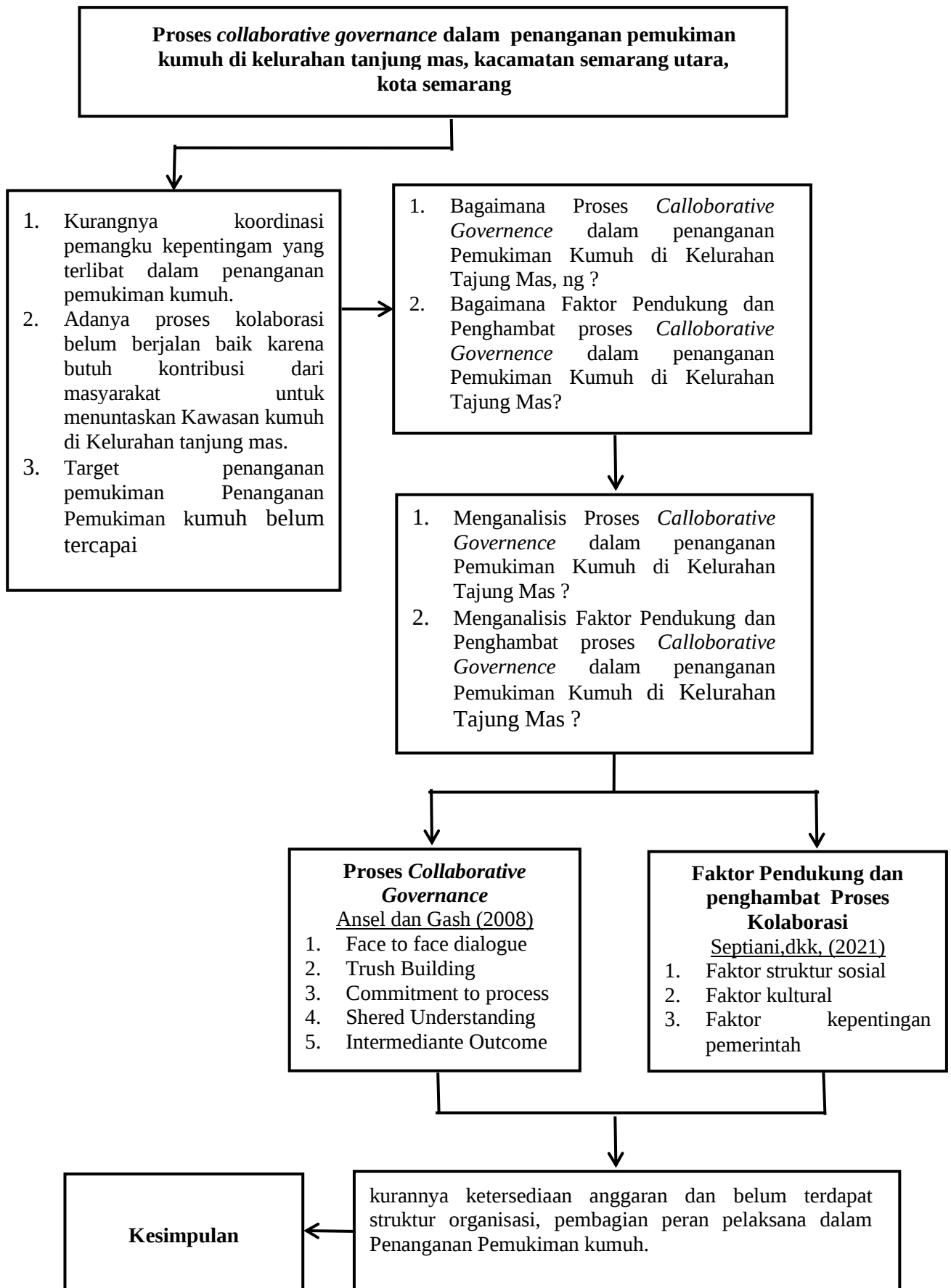
b. Kultural

Pada faktor ini sangat berkaitan dengan budaya yang dilakukan dalam kolaborasi. Dari hasil penelitian masyarakat yang berada disekitar wilayah permukiman kumuh memiliki budaya atau kebiasaan yang menjadi masalah nyata dalam proses kolaborasi penanganan Permukiman Kumuh..

c. Kepentingan pemerintah

Faktor kepentingan pemerintah sangat berkaitan dengan kepentingan politik antar *stakeholder* yang berkolaborasi.

## 1.8 Kerangka Pikir penelitian



## **1.9 Argumen Penelitian**

Proses *collaborative governance* merupakan hal utama dalam proses penanganan permukiman kumuh karena dengan adanya proses kolaborasi maka keseluruhan *stakeholder* dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam pemberlakuanya menjadi lebih efektif dan efisien agar tercapainya tujuan dapat dilakukan lebih cepat dan mudah, namun pada kenyataanya proses kolaborasi di Kelurahan Tanjung Mas belum berjalan secara optimal dikarenakan beberapa kendala dalam komunikasi antar *stakeholder* secara langsung dan kesadaran dari masing-masing *stakeholder*.

## **1.10 Metodologi Penelitian**

### **1.10.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif dengan pengamatan dari peneliti secara langsung maupun tidak langsung terkait proses *collaborative governance* dalam penanganan pemukiman kumuh di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Penelitian kualitatif ini dilakukan dalam memahami permasalahan ataupun hambatan dalam pelaksanaan proses *collaborative governance*.

### **1.10.2 Situs Penelitian**

Situs penelitian merupakan lokasi dan letak penelitian akan dilaksanakan. Lokus yang dipilih dalam penelitian ini adalah penanganan pemukiman kumuh di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Lokasi penelitian yang ditetapkan ditujukan dalam rangka memberikan batasan ruang lingkup penelitian dengan fokus pada fenomena yang terjadi.

### **1.10.3 Subjek Penelitian**

Informan dalam penelitian ini adalah seluruh *stakeholders* yang terlibat dalam proses kolaborasi yang meliputi BAPPEDA Kota Semarang, DISPERKIM Kota Semarang, Kepala Kelurahan Tanjung Mas, Badan Keswadayaan Masyarakat dan Masyarakat Tanjung Mas

### **1.10.4 Jenis Data**

Jenis data yang akan digunakan pada penelitian adalah menggunakan data kualitatif

yang meliputi tata letak geografis, objek, data profil dari keseluruhan *stakeholders* yang terlibat, proses *collaborative governance* di Kelurahan Tanjung Mas, keberhasilan kolaborasi yang dilakukan, faktor penghambat dan pendorong keberlangsungan proses *collaborative governance*.

#### **1.10.5 Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi wawancara dan observasi secara langsung. BAPPEDA Kota Semarang, DISPERKIM Kota Semarang, Kepala Kelurahan Tanjung Mas, Badan Keswadayaan Masyarakat dan Masyarakat Tanjung Mas

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

###### **a. Dokumentasi**

Dokumentasi yang digunakan meliputi arsip-arsip dan laporan kegiatan resmi yang ada di Dinas ataupun pemerintah kelurahan dalam proses *collaborative governance* di Kelurahan Tanjung Mas.

###### **b. Artikel dan informasi melalui jurnal dan internet.**

###### **c. Peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengelolaan Pemukiman Kumuh.**

#### **1.10.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yakni sebagai berikut:

##### **1. Wawancara**

Wawancara mendalam pada penelitian ini dilakukan kepada Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai fasilitator utama dalam proses *collaborative governance*, Kelurahan Tanjung Mas sebagai lembaga pemerintah setempat yang bersentuhan langsung dengan permasalahan yang ada di Kelurahan Tanjung Mas, BAPPEDA ( Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Semarang ) dan Badan Keswadayaan Masyarakat, Kepala Kelurahan Tanjung Mas dan Warga Tanjung Mas. Penelitian ini juga menggunakan dokumentasi foto bersama dengan informan penelitian dalam pengumpulan data maupun dalam observasi Kelurahan Tanjung Mas.

##### **2. Observasi**

Observasi penelitian dilaksanakan langsung dengan pengamatan proses *collaborative governance* di Kelurahan Tanjung Mas. melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan kegiatan yang memungkinkan pengambilan data.

### 3. Studi Keperpustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari, menganalisis, dan memahami literatur dari dokumen, arsip-arsip, dan laporan kegiatan resmi yang ada di dinas maupun pemerintah desa yang terlibat dalam proses *collaborative governance* di Kelurahan Tanjung Mas serta artikel ataupun informasi dari jurnal.

Pengumpulan data diproses menggunakan teknik *purposive sampling* dan teknik *snowball*. *Purposive sampling* adalah teknik dalam menentukan sampel yang digunakan dalam penentuan narasumber berdasarkan pada tujuan dan pertimbangan bahwa narasumber yang dipilih adalah yang memahami permasalahan yang akan diteliti, sehingga dapat mempermudah peneliti. *Snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel begitu seterusnya, sehingga jumlah sample semakin banyak (Sugiyono, 2016: 218-219).

#### 1.10.7 Analisis dan Interpretasi Data

1. Pengumpulan data merupakan proses yang dilakukan peneliti dalam memperoleh data yang akan diperlukan berdasarkan hasil dari wawancara, dokumentasi, observasi, dan studi kepustakaan.
2. Reduksi data dilakukan apabila proses pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, menulis catatan, dan lain sebagainya dengan tujuan menyeleksi data atau informasi yang tidak sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.
3. Uji keabsahan adalah proses pengujian keberadaan atau keabsahan dengan menggunakan uji kredibilitas data yang digunakan dengan menggunakan teknik triangulasi.
4. Penyajian data menggunakan bentuk uraian singkat berupa tabel, grafik, dan lain sebagainya sehingga mempermudah dalam memahami fenomena yang terjadi dalam penyusunan rencana kerja.
5. Penarikan kesimpulan yang dilakukan bersifat temporal, data yang diperoleh telah dianalisis kemudian dijelaskan dan diartikan dalam bentuk kalimat-kalimat dengan

tujuan untuk mendeskripsikan fakta yang ada di lapangan. Berdasarkan keterangan tersebut pada setiap tahapan dalam proses penelitian yang digunakan untuk mendapatkan keabsahan data dengan mempelajari seluruh data yang ada melalui berbagai sumber yang didapatkan dari lapangan dan dokumentasi melalui metode wawancara.

#### **1.10.8 Keabsahan Data**

Menurut William dan Wiersma dalam Sugiyono (2016: 372-374) menjelaskan bahwa triangulasi adalah suatu proses cek data yang berasal dari sumber, cara, dan waktu. Tiga cara dalam proses triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu, yaitu

1. Triangulasi sumber adalah proses uji validitas data melalui sumber yang berbeda.
2. Triangulasi teknik adalah uji kredibilitas data kepada sumber yang sama namun dengan teknik berbeda, seperti wawancara kemudian dilakukan sinkronisasi studi kepustakaan, dokumentasi, dan observasi.
3. Triangulasi waktu adalah uji data menggunakan sumber yang sama dengan waktu berbeda.
4. Pengujian validitas data pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Sumber informasi diperoleh lebih tidak hanya dari satu informan saja, namun dapat menggunakan sumber data berupa dokumen, arsip, hasil wawancara.

Dalam penelitian Model Calloborative Governance dalam Penanganan pemukiman kumuh, KelurahanTanjung Mas, Kota Semarang Untuk menciptakan wilayah tanpa kumuh menggunakan ketiga gabungan triangulasi. Sebab dalam penelitian ini kedepannya peneliti akanmenerapkan beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dengan mengecek lalu menguji. Informan yaitu Badan Perencanaan Daerah Kota Semarang, Kepala Kelurahan Tajung Mas, Badan Keswadayaan Maasyarakat dan masyarakat Tanjung Mas. Penggunaan kombinasi tiga triangulasi ini dimaksudkan agar data yang diperoleh tidak diragukan lagi keabsahanya.